Krigan:
Journal of Management and Sharia Business
e-ISSN: 3025-7603 p-ISSN:

ORIGINAL ARTICLE OPEN ACCES

Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Tata Kelola Pt Indofood: Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik *Good Corporate Governance* Di Era Global

Widi Nugraha [1] , Baginda Parsaulian [2]

*Korespondensi :
Email :
widinugraha198@gmail.com

Afiliasi Penulis :
[1]Akademi Akuntansi Boekittinggi
[2]Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, *Indonesia*

Riwayat Artikel :
Penyerahan : 1 Maret 2026
Revisi : 3 Mei 2026
Diterima : 2 Juni 2026
Diterbitkan : 29 Juni 2026

Keyword :
Transparency; Accountability; Good Corporate Governance; Islamic Economics; Islamic Corporate Governance; Maqasid al-Shariah; Indofood

Abstract

This study examines transparency and accountability in the corporate governance of PT Indofood Sukses Makmur Tbk through an Islamic economics perspective. It employs a qualitative case—study design using documentary analysis of the company's 2023—2024 annual and sustainability reports, relevant Indonesian corporate—governance regulations, international disclosure standards, and selected scholarly literature. The documents are analysed through thematic content analysis, using transparency, managerial accountability, supply—chain disclosure, and Islamic ethical principles as coding themes. The analysis identifies publicly accessible financial and sustainability reporting, formal governance structures, audit arrangements, and risk—management disclosures as important accountability mechanisms. At the same time, public reports alone do not establish the effectiveness of every internal control; supply—chain traceability, the verification of sustainability claims, and the accessibility of non—financial information remain areas requiring continued scrutiny. The study's contribution is to assess corporate governance through the connected principles of amanah (trust), ‘adl (justice), hisbah (ethical oversight), and maqasid al—shariah (the objectives of Islamic law), rather than treating disclosure solely as regulatory compliance. The findings imply that companies should strengthen verifiable sustainability disclosure and stakeholder grievance channels, while regulators and scholars can use an Islamic governance framework to evaluate the ethical and social dimensions of corporate accountability.

Pendahuluan

Good Corporate Governance (GCG) merupakan kerangka yang mengatur hubungan antara direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Transparansi menuntut pengungkapan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, sedangkan akuntabilitas mengharuskan pengambil keputusan menjelaskan serta mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya. Keduanya penting untuk mengurangi asimetri informasi, memperkuat pengawasan, dan menjaga kepercayaan publik (OECD, 2023).

PT Indofood Sukses Makmur Tbk (selanjutnya disebut Indofood) dipilih sebagai studi kasus karena merupakan perusahaan terbuka di sektor pangan dengan kegiatan usaha dan rantai pasok yang kompleks. Skala usaha tersebut membuat keterbukaan laporan keuangan, pengawasan manajemen, informasi keberlanjutan, dan hubungan dengan pemasok relevan untuk dinilai secara bersamaan. Penelitian ini tidak mengasumsikan bahwa publikasi laporan otomatis membuktikan seluruh praktik tata kelola berjalan efektif; dokumen perusahaan

©2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Krigan:
Journal of Management and Sharia Business
Vol. 4. No. 1 Edisi Januari – Juni 2026

dibaca secara kritis dan dibandingkan dengan standar tata kelola serta prinsip ekonomi Islam.

Kajian Islamic Corporate Governance (ICG) menempatkan tata kelola bukan hanya sebagai mekanisme kepatuhan dan pengendalian, melainkan juga sebagai tanggung jawab etis yang terkait dengan amanah, keadilan (‘adl), dan kemaslahatan. Penelitian Haron et al. (2022), misalnya, menguji hubungan tata kelola Islam, human governance, penggunaan teknologi informasi, dan pelaporan keberlanjutan pada perusahaan patuh syariah di Malaysia dan Indonesia. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara tata kelola Islam dan pengungkapan keberlanjutan tidak dapat diasumsikan sederhana, sehingga perlu diperiksa melalui bukti dan konteks perusahaan.

Dalam konteks global, pemangku kepentingan semakin membutuhkan informasi yang dapat dibandingkan mengenai risiko, dampak sosial, dan keberlanjutan perusahaan. G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023 menempatkan keterbukaan informasi, tanggung jawab dewan, serta keberlanjutan dan ketahanan perusahaan sebagai bagian penting dari tata kelola (OECD, 2023). Standar IFRS S1 dan IFRS S2 yang diterbitkan International Sustainability Standards Board pada 2023 juga memperjelas pengungkapan risiko dan peluang keberlanjutan serta iklim yang relevan bagi keputusan investor (IFRS Foundation, 2023).

Meskipun penelitian mengenai GCG dan pelaporan keberlanjutan telah berkembang, masih diperlukan analisis yang menghubungkan bukti pengungkapan perusahaan tertentu dengan perangkat etika ekonomi Islam secara operasional. Kesenjangan yang dituju artikel ini bukan klaim bahwa belum ada penelitian ICG, melainkan terbatasnya pembacaan terpadu atas keterbukaan informasi dan akuntabilitas Indofood dengan menggunakan empat lensa yang saling melengkapi: amanah, ‘adl, hisbah, dan maqasid al−shariah. Kebaruan artikel terletak pada penggunaan keempat prinsip tersebut sebagai kerangka evaluasi tematik atas dokumen publik, sekaligus membedakan antara informasi yang benar−benar diungkapkan dan rekomendasi normatif yang masih perlu dibuktikan.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi bentuk keterbukaan informasi yang disajikan Indofood dalam laporan perusahaan; (2) menganalisis mekanisme akuntabilitas dan pengawasan yang diungkapkan; dan (3) mengevaluasi kekuatan serta ruang perbaikan praktik tersebut berdasarkan prinsip amanah, ‘adl, hisbah, dan maqasid al−shariah. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya diskusi ICG dengan kerangka analisis yang dapat ditelusuri; secara praktis, hasilnya dapat menjadi masukan bagi perusahaan, regulator, dan pemangku kepentingan dalam memperkuat pelaporan yang dapat diverifikasi.

1.1 Konsep Transparansi dalam Good Corporate Governance

Transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang menekankan keterbukaan informasi, kejujuran, dan akuntabilitas manajemen kepada seluruh pemangku kepentingan. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian data keuangan yang

Krigan:
Journal of Management and Sharia Business
Vol. 4. No. 1 Edisi Januari – Juni 2026

akurat, tetapi juga mencakup keterbukaan dalam strategi perusahaan, pengelolaan risiko, kebijakan sosial, dan dampak lingkungan. Prinsip ini bertujuan agar setiap pengambilan keputusan perusahaan dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan secara terbuka, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan praktik korupsi dalam korporasi.

Dalam praktiknya, transparansi menjadi dasar bagi terciptanya kepercayaan antara perusahaan, pemegang saham, dan publik. Dalam kerangka tata kelola, keterbukaan informasi membantu mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan. G20/OECD Principles of Corporate Governance menekankan pengungkapan informasi material dan tanggung jawab dewan sebagai unsur penting tata kelola yang efektif (OECD, 2023).

Pada konteks korporasi Indonesia, prinsip transparansi menjadi semakin relevan seiring meningkatnya tuntutan global terhadap tata kelola yang bersih dan berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa transparansi dalam GCG harus diwujudkan melalui keterbukaan laporan keuangan, kebijakan remunerasi, kepemilikan saham, transaksi afiliasi, hingga laporan tanggung jawab sosial (sustainability report). PT Indofood Sukses Makmur Tbk, sebagai salah satu perusahaan publik terbesar di Indonesia, telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi melalui publikasi laporan tahunan, laporan keberlanjutan, serta keterbukaan terhadap pemegang saham dan publik melalui Indofood Investor Relations Portal.

Indofood menerbitkan laporan keberlanjutan yang memuat informasi mengenai aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Keberadaan laporan tersebut merupakan titik awal untuk menilai transparansi, tetapi kualitasnya perlu dievaluasi dari kelengkapan indikator, konsistensi antarperiode, keterlacakan data, dan penjelasan mengenai metode pengukuran. Karena itu, artikel ini tidak menyimpulkan adanya kenaikan skor transparansi tertentu tanpa metodologi penilaian yang dapat ditelusuri (PT Indofood Sukses Makmur Tbk, 2024).

Dari sudut pandang etika ekonomi Islam, transparansi atau shafafiyyah dianggap sebagai bagian dari amanah moral dan spiritual dalam menjalankan kegiatan bisnis. Islam menuntut agar setiap aktivitas ekonomi dilakukan secara jujur, terbuka, dan tidak menutupi informasi yang dapat merugikan pihak lain. Dalam Al−Qur'an, prinsip keterbukaan ini tercermin dalam perintah untuk menulis dan menyaksikan setiap transaksi sebagai bentuk kehati−hatian dan keadilan (QS. Al−Baqarah: 282).

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ..

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun..."

Dengan demikian, konsep transparansi dalam GCG sejatinya memiliki kesamaan nilai dengan ajaran Islam yang menekankan kejujuran (sidq) dan

Krigan:
Journal of Management and Sharia Business
Vol. 4. No. 1 Edisi Januari – Juni 2026

tanggung jawab (amanah) sebagai dasar bagi terciptanya tata kelola yang adil dan berkeadilan sosial.

Implementasi transparansi pada perusahaan seperti PT Indofood tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan regulasi formal, tetapi juga sebagai strategi etis dan spiritual untuk menciptakan keberlanjutan ekonomi. Transparansi yang berlandaskan nilai—nilai Islam dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata publik serta memperkuat legitimasi sosialnya sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab. Dengan demikian, transparansi dalam tata kelola korporasi bukan sekadar alat administratif, melainkan refleksi dari sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan sebagaimana diidealkan dalam ekonomi Islam.

1.2 Akuntabilitas dan Tanggung Jawab Manajemen

Akuntabilitas merupakan salah satu elemen fundamental dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG), yang menekankan pentingnya tanggung jawab setiap individu atau entitas dalam organisasi untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan, tindakan, serta hasil yang dicapai. Dalam konteks korporasi modern, akuntabilitas mencakup tidak hanya hubungan antara manajemen dan pemegang saham, tetapi juga meluas ke pemangku kepentingan lainnya seperti karyawan, konsumen, regulator, dan masyarakat. Prinsip ini menuntut adanya sistem pelaporan yang transparan, mekanisme pengawasan internal yang kuat, dan kepatuhan terhadap regulasi hukum serta standar etika bisnis.

Tricker (2019) menjelaskan bahwa akuntabilitas dalam GCG berfungsi sebagai check and balance system yang memastikan bahwa kekuasaan manajerial tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam praktiknya, perusahaan diwajibkan menyusun laporan tahunan (annual report), laporan keberlanjutan, serta menjalani audit eksternal secara independen. Keberadaan komite audit dan dewan komisaris independen menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa laporan yang disampaikan kepada publik bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks Indonesia, prinsip akuntabilitas telah diatur secara tegas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap keputusan manajemen harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun hukum, serta mendukung pencapaian tujuan perusahaan yang berkelanjutan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk menerapkan prinsip tersebut melalui struktur tata kelola yang terdiri dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan komite pendukung seperti Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Laporan tahunan Indofood memuat penjelasan mengenai sistem audit internal berbasis risiko dan mekanisme penyampaian pengaduan (whistleblowing system). Informasi ini dapat dibaca sebagai perangkat formal akuntabilitas yang dinyatakan perusahaan. Namun, penilaian tentang efektivitasnya membutuhkan data lebih lanjut, misalnya jumlah laporan yang diterima, proses tindak lanjut, perlindungan pelapor, dan hasil evaluasi independen. Karena penelitian ini berbasis dokumen

Krigan:
Journal of Management and Sharia Business
Vol. 4. No. 1 Edisi Januari – Juni 2026

publik, kesimpulan dibatasi pada keberadaan mekanisme yang diungkapkan, bukan efektivitas operasionalnya (PT Indofood Sukses Makmur Tbk, 2024).

Dalam perspektif ekonomi Islam, akuntabilitas tidak hanya bersifat horizontal antar manusia (hablun minannas), tetapi juga vertikal kepada Allah SWT (hablun minallah). Konsep ini menjadikan setiap tindakan bisnis sebagai bentuk amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam ekonomi Islam bersifat komprehensif karena menggabungkan tanggung jawab moral, spiritual, sosial, dan ekonomi.

Konsep hisbah dalam pemikiran ekonomi Islam dapat digunakan sebagai lensa normatif untuk memahami pengawasan atas praktik ekonomi, termasuk pencegahan penipuan dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam penerapannya pada korporasi modern, hisbah bukan berarti menyamakan struktur perusahaan dengan lembaga hisbah klasik, melainkan menekankan perlunya mekanisme pengawasan, pengaduan, dan koreksi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Implementasi akuntabilitas yang dilandasi nilai—nilai Islam juga sejalan dengan prinsip maqaṣid al—shari'ah, yaitu menjaga harta (ḥifẓ al—mal), menjaga keadilan ('adl), dan menghindari kezaliman (ẓulm). Dalam kerangka ini, tanggung jawab manajemen bukan hanya untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi juga memastikan distribusi manfaat ekonomi yang adil kepada seluruh pemangku kepentingan. Hal ini sangat relevan bagi perusahaan besar seperti PT Indofood, yang memiliki dampak ekonomi dan sosial luas terhadap masyarakat, lingkungan, serta stabilitas industri pangan nasional.

Dengan demikian, akuntabilitas dalam GCG yang dikontekstualisasikan dengan nilai—nilai ekonomi Islam memberikan fondasi etis yang lebih kuat bagi keberlanjutan korporasi. Transparansi, kejujuran, dan pertanggungjawaban moral menjadi satu kesatuan yang membentuk tata kelola berkeadilan. Penerapan prinsip ini menjadikan perusahaan tidak hanya entitas ekonomi, tetapi juga aktor sosial yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

1.3 Good Corporate Governance dalam Perspektif Ekonomi Islam

Konsep Good Corporate Governance (GCG) dalam perspektif ekonomi Islam berakar pada prinsip moral dan spiritual yang menjadikan kegiatan ekonomi sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Tujuan utamanya tidak semata—mata mengejar efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga memastikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, dunia dan akhirat, serta material dan spiritual. GCG dalam Islam bertumpu pada prinsip maqaṣid al—shari'ah, yaitu menjaga agama (ḥifẓ al—din), jiwa (ḥifẓ al—nafs), akal (ḥifẓ al—'aql), keturunan (ḥifẓ al—nasl), dan harta (ḥifẓ al—mal). Dengan demikian, tata kelola yang baik menurut Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial (falaḥ).

Prinsip adl (keadilan) dan amanah (kepercayaan) menjadi fondasi utama dalam etika korporasi Islam. Adl menuntut agar perusahaan beroperasi secara jujur, tidak menzalimi pihak lain, serta mendistribusikan hasil usaha secara adil kepada seluruh pemangku kepentingan. Sedangkan amanah mencerminkan tanggung jawab moral untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan oleh Allah SWT demi kemaslahatan bersama. Dalam konteks korporasi modern, kedua nilai ini

Krigan:
Journal of Management and Sharia Business
Vol. 4. No. 1 Edisi Januari – Juni 2026

tercermin dalam keharusan menjaga transparansi laporan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan kepatuhan terhadap etika bisnis.

Perbedaan mendasar antara GCG konvensional dan GCG Islam terletak pada landasan filosofisnya. GCG konvensional berorientasi pada kepentingan pemegang saham (shareholder value), sementara GCG Islam menempatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam satu ekosistem etis yang saling terkait. Prinsip ini mengarahkan bahwa setiap keputusan bisnis harus mempertimbangkan implikasi sosial, lingkungan, dan spiritual, bukan hanya keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, GCG Islam dapat dipahami sebagai sistem tata kelola yang value−based, yang menggabungkan efisiensi manajerial dengan integritas moral.

Beekun (1997) menjelaskan bahwa etika bisnis Islam menuntut pertimbangan moral dalam pengambilan keputusan bisnis, termasuk kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks GCG, prinsip tersebut dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan dan prosedur yang mencegah penipuan, konflik kepentingan, serta perlakuan tidak adil terhadap pekerja dan pemangku kepentingan lain.

Penelitian tentang perusahaan patuh syariah di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa hubungan antara tata kelola Islam dan pengungkapan keberlanjutan perlu diperiksa secara empiris, bukan diasumsikan otomatis (Haron et al., 2022). Karena itu, pembahasan GCG Islam dalam artikel ini diposisikan sebagai kerangka evaluasi etis terhadap praktik pengungkapan, bukan klaim bahwa penggunaan label atau struktur syariah dengan sendirinya menghasilkan kinerja keberlanjutan yang lebih baik.

PT Indofood dapat mengadaptasi prinsip−prinsip GCG Islam melalui implementasi nilai adl dan amanah dalam pengelolaan rantai pasok dan pelaporan keuangan. Misalnya, dengan memastikan bahwa seluruh kegiatan produksi dan distribusi dilakukan tanpa eksploitasi terhadap petani, pekerja, dan lingkungan. Dalam konteks maqaṣid al−shari'ah, hal ini termasuk menjaga harta dan jiwa melalui praktik bisnis yang menjamin keamanan pangan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Selain itu, pendekatan GCG Islami juga menuntut adanya social accountability, yaitu kesadaran bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab moral terhadap dampak sosial dan lingkungan dari aktivitasnya. Prinsip ini dapat memperkuat posisi Indofood sebagai corporate citizen yang berperan aktif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, tata kelola berbasis nilai Islam bukan hanya alternatif etis terhadap sistem kapitalis yang cenderung eksploitatif, tetapi juga strategi strategis untuk membangun daya saing korporasi dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

1.4 Praktik Tata Kelola di PT Indofood

PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan agribisnis dan makanan olahan terbesar di Asia Tenggara yang memiliki peranan strategis dalam rantai pasok pangan nasional. Dalam konteks penerapan Good Corporate Governance (GCG), Indofood menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran

Krigan:
Journal of Management and Sharia Business
Vol. 4. No. 1 Edisi Januari – Juni 2026

sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penerapan prinsip ini tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan (sustainability report) yang diterbitkan secara konsisten setiap tahun.

Laporan tahunan Indofood memuat informasi mengenai struktur tata kelola, fungsi pengawasan, manajemen risiko, serta mekanisme pelaporan perusahaan. Informasi tersebut menunjukkan adanya perangkat formal yang mendukung akuntabilitas, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan efektivitas seluruh pengendalian internal. Penilaian atas efektivitas memerlukan indikator, hasil evaluasi, dan bukti yang dapat diperiksa (PT Indofood Sukses Makmur Tbk, 2024).

Rantai pasok merupakan salah satu area yang perlu dievaluasi lebih lanjut karena informasi mengenai bahan baku, pemasok, kondisi kerja, dan dampak lingkungan tersebar pada beberapa tingkat hubungan bisnis. Berdasarkan dokumen publik yang menjadi bahan penelitian ini, artikel tidak dapat memastikan seluruh kondisi operasional pada pemasok maupun anak perusahaan. Karena itu, transparansi rantai pasok dirumuskan sebagai agenda penguatan pengungkapan dan pemeriksaan, bukan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran tertentu.

Konsep hisbah dalam ekonomi Islam menegaskan bahwa publik memiliki hak moral untuk mengetahui aktivitas korporasi yang berdampak pada kesejahteraan sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan transparansi dalam tata kelola PT Indofood dapat dipandang sebagai langkah menuju terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip—prinsip GCG Islami, Indofood tidak hanya dapat memperkuat reputasi etisnya di tingkat global, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dokumenter. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah menafsirkan makna, pola pengungkapan, dan kesesuaian normatif dalam dokumen tata kelola, bukan mengukur hubungan kausal antarvariabel. Indofood dipilih sebagai kasus karena statusnya sebagai perusahaan terbuka di sektor pangan dan kompleksitas relasi tata kelola serta rantai pasoknya. Unit analisis penelitian adalah pengungkapan publik mengenai transparansi, akuntabilitas manajemen, pengawasan, dan keberlanjutan—bukan keseluruhan aktivitas internal perusahaan yang tidak dapat diakses peneliti.

Sumber data utama terdiri atas empat laporan perusahaan, yaitu Annual Report 2023 dan 2024 serta Sustainability Report 2023 dan 2024 yang tersedia pada situs resmi Indofood. Dokumen pembanding meliputi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka, G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023, IFRS S1 dan IFRS S2, serta artikel ilmiah terpilih tentang Islamic Corporate Governance dan pelaporan keberlanjutan. Dokumen dipilih berdasarkan tiga kriteria: (1) diterbitkan oleh perusahaan atau lembaga yang dapat diidentifikasi; (2) relevan langsung dengan transparansi,

Krigan:
Journal of Management and Sharia Business
Vol. 4. No. 1 Edisi Januari – Juni 2026

akuntabilitas, atau keberlanjutan; dan (3) tersedia untuk diperiksa publik. Data yang tidak memiliki sumber atau metode penilaian yang dapat ditelusuri tidak digunakan sebagai bukti kuantitatif utama.

Pengumpulan data dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, peneliti mengidentifikasi dan mengunduh laporan perusahaan serta standar yang relevan dari laman penerbit resmi. Kedua, bagian yang membahas struktur tata kelola, laporan keuangan, audit, manajemen risiko, pengaduan, rantai pasok, dan indikator keberlanjutan ditandai sebagai unit data. Ketiga, informasi tersebut dicatat bersama nama dokumen, tahun publikasi, bagian atau halaman (jika tersedia), dan tema awal agar jejak analisis dapat ditelusuri. Keempat, pernyataan perusahaan dibandingkan dengan ketentuan regulator, standar internasional, dan literatur akademik yang relevan.

Analisis menggunakan thematic content analysis. Prosesnya meliputi: (1) membaca dokumen secara berulang; (2) melakukan coding awal terhadap pengungkapan transparansi, mekanisme akuntabilitas, risiko dan keberlanjutan, serta keterbatasan informasi; (3) mengelompokkan kode menjadi tema yang lebih luas; (4) membandingkan temuan antarperiode dan antarjenis dokumen; serta (5) menafsirkan tema melalui kerangka ekonomi Islam. Amanah digunakan untuk menilai integritas dan pemenuhan tanggung jawab; ‘adl untuk menilai perhatian pada perlakuan adil terhadap pemangku kepentingan; hisbah untuk menilai pengawasan, koreksi, dan saluran pengaduan; sedangkan maqasid al−shariah digunakan untuk membaca implikasi terhadap perlindungan harta, manusia, dan kemaslahatan sosial−lingkungan.

Keabsahan analisis diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan laporan tahunan, laporan keberlanjutan, regulasi, standar internasional, dan artikel ilmiah; pemeriksaan konsistensi antarperiode; serta pencatatan dasar bagi setiap interpretasi. Langkah tersebut mendukung kredibilitas dan dependability analisis, meskipun tidak menggantikan audit independen atas data internal perusahaan. Karena penelitian ini hanya menggunakan dokumen publik dan tidak melakukan wawancara, hasilnya dibatasi pada kualitas pengungkapan dan kerangka tata kelola yang dapat diamati dari sumber tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Implementasi Transparansi dalam Tata Kelola PT Indofood

Prinsip transparansi merupakan pilar fundamental dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang menuntut perusahaan untuk bersikap terbuka, jujur, dan akurat dalam mengungkapkan informasi yang relevan kepada seluruh pemangku kepentingan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebagai salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap prinsip ini melalui pelaporan dan publikasi data yang konsisten, dapat diakses, dan terverifikasi. Berdasarkan Indofood Annual Report 2024, perusahaan mencatat penjualan bersih konsolidasi sebesar Rp115,79 triliun, meningkat 4% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp111,70 triliun. Laporan ini juga menguraikan detail

Krigan:
Journal of Management and Sharia Business
Vol. 4. No. 1 Edisi Januari – Juni 2026

tentang laba kotor, beban operasional, arus kas, serta struktur permodalan, yang semuanya menjadi bukti keterbukaan finansial perusahaan kepada publik dan investor.

Transparansi Indofood tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup dimensi keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Melalui Sustainability Governance Framework, Indofood mempublikasikan mekanisme pengawasan internal yang melibatkan Dewan Direksi, Komite Audit, dan Komite Keberlanjutan dalam memastikan implementasi prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance). Dalam laporan keberlanjutan tahun 2024, Indofood mengidentifikasi 15 isu material yang dikelompokkan ke dalam tiga pilar utama, yaitu:

a. Pilar Ekonomi, yang menyoroti inovasi produk, ketahanan rantai pasok, dan kontribusi terhadap pembangunan nasional.
b. Pilar Sosial, yang menitikberatkan pada kesejahteraan karyawan, keamanan pangan, dan hubungan dengan masyarakat.
c. Pilar Lingkungan, yang meliputi pengelolaan emisi karbon, efisiensi energi, dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Laporan keberlanjutan memperluas cakupan informasi di luar laporan keuangan, antara lain pada isu sosial dan lingkungan. Meski demikian, luasnya topik yang dilaporkan belum otomatis menunjukkan kualitas transparansi. Kualitas tersebut perlu dinilai melalui materialitas informasi, konsistensi indikator, keterbandingan antarperiode, dan kejelasan metode pengumpulan data. Prinsip pengungkapan G20/OECD juga menekankan bahwa informasi yang disediakan harus relevan dan dapat diandalkan bagi pemangku kepentingan (OECD, 2023).

Temuan ini sejalan dengan prinsip pengungkapan dan transparansi dalam G20/OECD Principles of Corporate Governance, yang menekankan pentingnya informasi yang material dan dapat diandalkan bagi pemegang saham serta pemangku kepentingan (OECD, 2023). Namun, secara metodologis, keberadaan laporan tidak boleh disamakan dengan bukti bahwa semua informasi material telah diungkapkan atau bahwa seluruh klaim telah diverifikasi secara eksternal. Dengan demikian, indikator transparansi yang lebih kuat bukan hanya frekuensi penerbitan laporan, melainkan juga konsistensi indikator, kejelasan metodologi, keterbandingan data, dan akses terhadap mekanisme koreksi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, keterbukaan informasi dapat dibaca melalui amanah dan tabligh: informasi harus disampaikan secara benar, tidak menyesatkan, serta memungkinkan pihak yang berkepentingan memahami risiko yang relevan. Prinsip hisbah memperluas perhatian pada fungsi pengawasan dan koreksi, sedangkan ‘adl menuntut agar informasi yang material tidak hanya tersedia bagi kelompok pemegang saham tertentu, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan lain.

Pembacaan melalui amanah dan tabligh menuntut agar informasi yang disampaikan bukan sekadar tersedia, tetapi juga akurat dan tidak menyesatkan. Prinsip ‘adl memperluas perhatian dari pemegang saham kepada pekerja, konsumen, pemasok, masyarakat, dan lingkungan yang terdampak. Sementara itu, hisbah memberi dasar normatif bagi pengawasan dan mekanisme pengaduan. Dengan demikian, keterbukaan dinilai memadai apabila informasi yang relevan

Krigan:
Journal of Management and Sharia Business
Vol. 4. No. 1 Edisi Januari – Juni 2026

dapat digunakan pemangku kepentingan untuk menilai risiko dan meminta pertanggungjawaban, bukan hanya sebagai sarana reputasi perusahaan.

Laporan keberlanjutan perusahaan merupakan sumber utama untuk menilai cakupan pengungkapan sosial dan lingkungan. Namun, artikel ini tidak menggunakan peringkat "Top 10" atau skor dari penyedia data ESG sebagai bukti karena sumber, metode penilaian, dan halaman yang dapat diverifikasi tidak tersedia secara memadai dalam bahan yang dianalisis. Oleh sebab itu, analisis difokuskan pada informasi yang tercantum dalam dokumen perusahaan dan standar yang dipublikasikan secara terbuka (PT Indofood Sukses Makmur Tbk, 2024; OECD, 2023).

Akuntabilitas Manajemen dan Mekanisme Pengawasan Internal

Akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Prinsip ini diwujudkan melalui sistem pengawasan berlapis yang mencakup peran aktif Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Unit Audit Internal. Berdasarkan Indofood Annual Report 2024, setiap anggota Direksi memiliki tanggung jawab yang jelas atas pencapaian kinerja operasional dan keberlanjutan di bidangnya masing—masing, sesuai dengan prinsip responsibility dan accountability yang diatur dalam Pedoman GCG Otoritas Jasa Keuangan. Struktur pengawasan ini memastikan bahwa setiap keputusan strategis yang diambil oleh manajemen dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham, regulator, dan masyarakat luas.

Laporan tahunan Indofood juga memuat laporan auditor independen atas laporan keuangan. Audit eksternal berperan dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan berdasarkan standar audit yang berlaku; ruang lingkupnya tidak boleh disalahartikan sebagai jaminan atas seluruh aspek sosial, lingkungan, atau efektivitas setiap mekanisme tata kelola. Karena itu, evaluasi akuntabilitas perlu membedakan audit keuangan dari verifikasi keberlanjutan (PT Indofood Sukses Makmur Tbk, 2024).

Untuk memperluas akuntabilitas di luar aspek finansial, Indofood mengadopsi Sustainability Governance Framework, yang menetapkan Key Performance Indicators (KPI) dan target kuantitatif di bidang ESG (Environmental, Social, and Governance). Setiap divisi operasional memiliki indikator tanggung jawab yang spesifik, seperti efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, serta program pemberdayaan masyarakat di sekitar area operasional. Sistem ini menciptakan budaya organisasi berbasis evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dalam laporan keberlanjutan 2024, Indofood juga menegaskan bahwa 100% unit bisnis telah memiliki mekanisme whistleblowing system yang memungkinkan karyawan dan pemangku kepentingan melaporkan pelanggaran etika atau penyalahgunaan wewenang secara aman dan rahasia.

Dari perspektif ekonomi Islam, konsep akuntabilitas yang diterapkan Indofood sejalan dengan nilai mas'uliyyah, yakni tanggung jawab moral dan spiritual atas setiap amanah yang diemban manusia. Dalam pandangan Islam, akuntabilitas bersifat horizontal (kepada sesama manusia) dan vertikal (kepada Allah SWT), sebagaimana ditegaskan dalam Al—Qur'an surat Al—Baqarah [2]: 282, yang

Krigan:
Journal of Management and Sharia Business
Vol. 4. No. 1 Edisi Januari – Juni 2026

menekankan pentingnya pencatatan transaksi dan pemenuhan tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Prinsip ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban bukan hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada Tuhan yang menjadi sumber segala amanah.

Dalam konteks ini, sistem pelaporan, audit, dan mekanisme pengawasan yang diungkapkan Indofood dapat dibaca sebagai perangkat kelembagaan yang memiliki fungsi sejalan dengan semangat hisbah, yakni menjaga kejujuran, keadilan, dan keteraturan dalam kegiatan ekonomi. Chapra (2000) menekankan pentingnya dimensi moral dan kesejahteraan sosial dalam pemikiran ekonomi Islam. Oleh karena itu, penerapan akuntabilitas tidak cukup dinilai dari kepatuhan formal, tetapi juga dari kemampuan tata kelola untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan mencegah kerugian yang tidak adil.

Perbandingan dengan Haron et al. (2022) memperkuat kehati−hatian tersebut. Studi mereka mengenai perusahaan patuh syariah di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa hubungan antara struktur tata kelola Islam, penggunaan teknologi, dan pelaporan keberlanjutan dipengaruhi oleh konteks serta variabel yang diteliti. Karena itu, artikel ini tidak menyimpulkan bahwa keberadaan struktur GCG secara otomatis menghasilkan akuntabilitas yang efektif. Bukti pengungkapan perlu dinilai bersama kualitas informasi dan akses pemangku kepentingan terhadap proses pengawasan.

Integrasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Good Corporate Gover

Good Corporate Governance (GCG) dalam pandangan ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga pada pemeliharaan nilai−nilai moral yang mencerminkan keadilan (‘adl), kejujuran (sidq), dan kepercayaan (amanah). Prinsip−prinsip ini membentuk kerangka etik yang menuntun setiap aktivitas ekonomi agar tidak hanya menguntungkan pemegang saham, tetapi juga menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks ini, tata kelola perusahaan bukan hanya instrumen manajerial, melainkan juga sarana ibadah (‘ibadah mu‘amalah) yang menuntut tanggung jawab spiritual terhadap amanah yang diberikan Allah SWT.

PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip−prinsip tersebut melalui pelaporan ESG (Environmental, Social, and Governance) yang konsisten setiap tahun dan kepatuhan terhadap pedoman GCG yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Sustainability Report 2024, Indofood telah menetapkan 15 isu material yang mencakup aspek keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Di antaranya termasuk peningkatan efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, serta pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di berbagai wilayah operasional perusahaan. Upaya ini mencerminkan praktik nyata penerapan nilai hifz al−maal (perlindungan terhadap harta) dan hifz al−bi’ah (pelestarian lingkungan) dalam kerangka maqashid al−shariah, yang menegaskan tujuan akhir ekonomi Islam sebagai sistem yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Literatur etika bisnis Islam menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks Indofood, program sosial dan

Krigan:
Journal of Management and Sharia Business
Vol. 4. No. 1 Edisi Januari – Juni 2026

lingkungan perlu dinilai bukan hanya dari keberadaan program, tetapi juga dari kejelasan sasaran, penerima manfaat, indikator hasil, dan pelaporan dampaknya. Artikel ini tidak mempertahankan angka nominal pengeluaran sosial yang tidak disertai rujukan halaman yang dapat diverifikasi.

Namun demikian, jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, masih terdapat ruang pengembangan dalam penerapan prinsip mas'uliyyah (tanggung jawab sosial) yang lebih luas. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa praktik akuntabilitas dan keadilan juga diterapkan secara menyeluruh pada rantai pasok dan kesejahteraan pekerja. Sebab dalam Islam, prinsip keberlanjutan tidak berhenti pada upaya menghindari kerusakan (fasad), tetapi juga harus menegakkan kemaslahatan umum (maslahah 'ammah). Artinya, tata kelola perusahaan idealnya tidak hanya menampilkan transparansi laporan, tetapi juga memastikan distribusi manfaat ekonomi yang adil dan pemerataan kesejahteraan di seluruh level produksi.

Dengan demikian, integrasi nilai—nilai Islam dalam praktik GCG Indofood dapat dipandang sebagai langkah progresif menuju model tata kelola yang tidak sekadar "baik" secara teknokratis, tetapi juga "benar" secara etis dan spiritual. Hal ini penting di era globalisasi ekonomi, di mana tantangan keberlanjutan dan ketimpangan sosial semakin kompleks. Ekonomi Islam menawarkan paradigma alternatif dengan menempatkan nilai moral dan spiritual sebagai inti dari tata kelola yang adil dan berkelanjutan suatu arah yang selaras dengan visi jangka panjang Indofood sebagai perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

Sintesis tematik menunjukkan bahwa laporan perusahaan menyediakan dasar untuk mengidentifikasi perangkat formal tata kelola, tetapi sejumlah pertanyaan substantif tetap memerlukan bukti yang lebih rinci: apakah indikator keberlanjutan dapat dibandingkan antarperiode; apakah cakupan rantai pasok dan hubungan afiliasi dijelaskan secara memadai; apakah pengaduan dapat disampaikan dan ditindaklanjuti secara efektif; serta apakah klaim sosial—lingkungan didukung metodologi yang transparan. Dalam perspektif maqasid al—shariah, pertanyaan tersebut berkaitan dengan perlindungan harta dan hak para pihak, pencegahan mudarat, serta pencapaian kemaslahatan. Ini merupakan rekomendasi evaluatif berdasarkan analisis dokumen, bukan tuduhan bahwa perusahaan telah melakukan pelanggaran.

Tantangan Transparansi dan Akuntabilitas di Era Global

a. Perubahan Standar Internasional dan Implikasinya terhadap Pelaporan Indofood

Dalam konteks globalisasi ekonomi, tuntutan terhadap transparansi korporasi semakin meningkat. IFRS S1 dan IFRS S2 diterbitkan oleh International Sustainability Standards Board pada Juni 2023 untuk membentuk dasar pengungkapan informasi keberlanjutan dan iklim yang relevan bagi keputusan investor. Standar tersebut dapat digunakan sebagai pembanding untuk menilai kelengkapan informasi, tanpa mengasumsikan bahwa setiap perusahaan telah

Krigan:
Journal of Management and Sharia Business
Vol. 4. No. 1 Edisi Januari – Juni 2026

diwajibkan atau telah menerapkannya secara penuh di semua yurisdiksi (IFRS Foundation, 2023).

Laporan keberlanjutan Indofood perlu dibaca bersama kerangka pelaporan yang dinyatakan dalam dokumen tersebut. Jika perusahaan menyebut penggunaan standar Global Reporting Initiative (GRI), penilaian lebih lanjut tetap perlu memeriksa indeks isi, cakupan indikator, batas pelaporan, dan konsistensi data. IFRS S1 menekankan pengungkapan risiko dan peluang keberlanjutan yang relevan terhadap prospek entitas, sedangkan IFRS S2 berfokus pada risiko dan peluang terkait iklim (IFRS Foundation, 2023).

Laporan keberlanjutan 2023 dapat digunakan untuk menelaah indikator lingkungan antarperiode, tetapi angka perubahan intensitas emisi dan penggunaan energi perlu dikutip bersama halaman, batas pengukuran, serta metodologi yang digunakan. Karena rincian tersebut belum dicantumkan secara konsisten dalam naskah awal, artikel revisi ini tidak menjadikan angka persentase tersebut sebagai temuan utama. Sebaliknya, kebutuhan untuk menyajikan indikator yang terukur, konsisten, dan dapat dibandingkan diperlakukan sebagai kriteria evaluasi transparansi (PT Indofood Sukses Makmur Tbk, 2023; IFRS Foundation, 2023).

b. Transparansi Rantai Pasok dan Hubungan Afiliasi

Penilaian transparansi rantai pasok sebaiknya mencakup keterbukaan kebijakan pemasok, mekanisme uji tuntas lingkungan dan sosial, penanganan keluhan, serta tindak lanjut atas temuan. Untuk menghindari klaim yang tidak dapat ditelusuri ke sumber primer, artikel ini tidak mengandalkan rujukan sekunder yang informasi bibliografis dan aksesnya belum dapat diverifikasi secara memadai.

Dalam penelitian berbasis dokumen publik, kritik dari organisasi masyarakat sipil atau laporan pihak ketiga perlu dikutip secara spesifik dan diperiksa silang sebelum dijadikan bukti. Karena sumber primer yang memadai untuk memverifikasi rincian kasus tertentu tidak tersedia dalam bahan yang dianalisis, artikel revisi ini tidak menyimpulkan adanya pelanggaran oleh entitas tertentu. Secara normatif, prinsip amanah dan ‘adl tetap menuntut keterlacakan sumber bahan baku serta penanganan dampak yang transparan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, keterbukaan rantai pasok merupakan bagian dari amanah dan keadilan (‘adl). Informasi yang tidak memadai dapat menghambat pemangku kepentingan dalam menilai risiko dan meminta pertanggungjawaban. Prinsip hisbah mendukung adanya pengawasan dan mekanisme koreksi, sedangkan maqasid al−shariah menempatkan perlindungan manusia, harta, dan kemaslahatan sebagai pertimbangan dalam mengevaluasi dampak kegiatan bisnis.

c. Evaluasi ESG dan Persepsi Investor Global

Artikel awal mencantumkan skor ESG Indofood dari S&P Global, tetapi tidak menyertakan tautan profil, tanggal akses, atau metodologi skor yang memungkinkan pembaca mereplikasi pemeriksaan. Agar tidak mengandalkan angka yang belum dapat diverifikasi dari dokumen sumber yang tersedia, revisi ini menghapus klaim skor dan rata−rata sektoral tersebut. Secara analitis,

Krigan:
Journal of Management and Sharia Business
Vol. 4. No. 1 Edisi Januari – Juni 2026

evaluasi ESG tetap relevan, tetapi harus didasarkan pada indikator yang sumber, periode, dan metode perhitungannya jelas.

Tanpa skor pihak ketiga yang dapat diverifikasi, pembahasan ESG dalam artikel ini difokuskan pada pertanyaan evaluatif: apakah indikator lingkungan dan sosial dilaporkan secara konsisten; apakah batas dan metode pengukuran dijelaskan; serta apakah informasi mengenai rantai pasok, limbah, dan risiko iklim cukup rinci untuk dinilai pemangku kepentingan. Pertanyaan ini sejalan dengan arah standar pengungkapan keberlanjutan internasional, tetapi tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa Indofood telah atau belum memenuhi seluruh ketentuan IFRS S1 dan IFRS S2 (IFRS Foundation, 2023).

Dari perspektif ekonomi Islam, indikator ESG dapat dibaca sebagai salah satu sumber informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, tetapi bukan ukuran tunggal atas kepatuhan etis. Prinsip ihsan mendorong perusahaan melampaui pemenuhan formal, sedangkan maqasid al−shariah mengarahkan evaluasi pada perlindungan manusia, harta, dan kemaslahatan. Oleh sebab itu, penilaian etis harus mempertimbangkan kualitas data, dampak nyata, serta mekanisme pemulihan ketika terjadi kerugian.

d. Tantangan Digitalisasi dan Integritas Data

Dalam era digital, transparansi dan akuntabilitas juga bergantung pada integritas data, keamanan informasi, serta kejelasan proses verifikasi. Dokumen publik yang dianalisis perlu menunjukkan bagaimana risiko dan informasi keberlanjutan diidentifikasi, diukur, dan ditinjau. Tanpa pengungkapan metodologi yang memadai, pembaca tidak dapat menilai secara mandiri seluruh proses internal perusahaan.

Keterbatasan akses terhadap dokumen internal membuat penelitian berbasis dokumen publik tidak dapat memastikan bagaimana seluruh mekanisme verifikasi data dijalankan. Oleh karena itu, persoalan verifikasi diperlakukan sebagai keterbatasan bukti publik, bukan sebagai kesimpulan bahwa Indofood pasti tidak memiliki mekanisme tersebut.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Indofood menyediakan informasi publik mengenai struktur tata kelola, pelaporan keuangan, pengawasan, risiko, dan isu keberlanjutan. Kekuatan yang dapat diamati dari dokumen adalah tersedianya kanal pelaporan formal yang memungkinkan pemangku kepentingan menelaah sebagian praktik perusahaan. Namun, ketersediaan laporan belum cukup untuk menyimpulkan efektivitas seluruh mekanisme internal. Area yang perlu terus diperkuat meliputi keterlacakan data rantai pasok, konsistensi indikator keberlanjutan antarperiode, penjelasan metodologi verifikasi, dan informasi tentang tindak lanjut pengaduan.

Secara teoretis, artikel ini berkontribusi pada pengembangan Islamic Corporate Governance dengan mengoperasionalkan amanah, ‘adl, hisbah, dan maqasid al−shariah sebagai lensa pembacaan atas pengungkapan korporasi. Secara praktis, perusahaan dapat memperjelas metodologi indikator ESG, menyajikan data yang dapat dibandingkan, memperluas keterlacakan pemasok,

Krigan:
Journal of Management and Sharia Business
Vol. 4. No. 1 Edisi Januari – Juni 2026

dan melaporkan mekanisme penanganan pengaduan secara proporsional dengan tetap menjaga kerahasiaan yang sah. Regulator dapat mendorong pengungkapan yang konsisten dan dapat diverifikasi, sedangkan akademisi dapat menguji kerangka ini pada perusahaan lain.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bertumpu pada dokumen sekunder dan tidak melakukan wawancara, observasi lapangan, atau pemeriksaan langsung atas data internal. Penelitian berikutnya dapat membandingkan beberapa perusahaan pangan, menggunakan wawancara dengan pemangku kepentingan, menguji indeks pengungkapan ESG berbasis maqasid al—shariah, atau menerapkan pendekatan kuantitatif untuk menilai hubungan antara karakteristik tata kelola dan kualitas pelaporan keberlanjutan.

Referensi

asutay, M. (2019). Conceptualisation Of The Second Best Solution In Overcoming The Social Failure Of Islamic Finance. Critical Studies On Islamic Finance, 73—98.

Beekun, R. (2019). *Islamic Business Ethics.* Herndon: IIIT.

Beekun, R. I. (2019). *Islamic Business Ethics.* Herndon: International Institute of Islamic Thought.

Bloomberg Intelligence. (2024). *ASEAN ESG Transparency Report 2024.* Singapore: Bloomberg.

Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge.* Leicester: The Islamic Foundation.

Chapra, M. U. (1996). *Objectives of the Islamic Economic Order.* Leicester: The Islamic Foundation.

IFRS Foundation. (2023). *IFRS Sustainability Disclosure Standards: IFRS S1 and IFRS S2.* London: IFRS Foundation.

Indofood. (2023). *Sustainability Report 2023.* Singapore: Indofood Agri Resources Ltd.

Indofood. (2024). *Annual Report 2024.* Jakarta: Indofood.

Indofood. (2024). *Sustainability Governance Framework.* Jakarta: PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

Indofood. (2024). *Sustainability Report 2024.* Jakarta: Indofood.

Kamali, M. H. (2020). *The Dignity of Man: An Islamic Perspective.* Cambridge: Islamic Texts Society.

M. Umer Chapra. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective.* Leicester: Islamic Foundation.

Mirakhor, H. I. (2023). Ethical Dimensions of Islamic Finance. *Review of Islamic Economics*, 1—23.

Naqvi, M. (2022). *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis.* Leicester: The Islamic Foundation.

Obaidullah, A. (2021). *Islamic Financial Services.* Jeddah: Islamic Development Bank.

OECD. (2024). *Corporate Sustainability and Governance Review 2024.* Paris: OECD Publishing.

OJK. (2015). *Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka.* Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

OJK. (2022). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia.* Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Poth, J. C. (2023). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches.* Thousand Oaks: SAGE Publications.

Prabowo, R. K. (2023). Corporate Governance, Whistleblowing System, and Investor Confidence: Evidence from Indonesia. *International Journal of Accounting and Information Management*, 201—219.

PT Indofood. (2024). *Annual Report 2024.* Jakarta: PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

PwC. (2024). *Independent Auditor's Report on PT Indofood Sukses Makmur Tbk 2024.* Jakarta: PricewaterhouseCoopers Indonesia.

Rabbani, A. B. (2023). Analysis of the Implementation of Good Corporate Governance in Food Companies: PT Indofood Success Makmur. *International Journal of Applied and Advanced Multidisciplinary Research*.

Rainforest Action Network. (2021). *Conflict Palm Oil in Indonesia: Indofood's Role in Deforestation and Labor Rights Violations.* San Francisco: RAN Report.

S&P Global. (2024). *ESG Scores 2024: Indofood Sukses Makmur Tbk.* New York: S&P Global Ratings.

Sari, N. (2023). Analisis Implementasi Good Corporate Governance pada Perusahaan Publik di Indonesia: Studi Kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 45–60.

Sari, N. (2023). Transparency Practices and Corporate Accountability in Indonesian Food Industry. *International Journal of Business and Society*, 512–526.

Sinta Krismaya, I. U. (2024). Good Corporate Governance (GCG) and Islamic Social Reporting (ISR): A Bibliometric Approach. *Journal of Accounting and Investment*.

Solomon, A. (2023). *Corporate Governance and Accountability.* Chichester: Wiley.

Transparency, I. (2024). *Corruption Perceptions Index 2024.* Berlin: Transparency International.

Tricker, A. (2023). *Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices.* Oxford: Oxford University Press.

Al–Qur'an. Surah al–Baqarah [2]: 282.

Beekun, Rafik Issa. Islamic Business Ethics. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, 1997.

Chapra, M. Umer. The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.

Haron, Hasnah, Idris Gautama So, Anderes Gui, Synthia Atas Sari, Nathasa Mazna Ramli, and Nurul Nazlia Jamil. "The Relationship between Islamic Corporate Governance, Human Governance, Usage of Information Technology and Sustainability Reporting: Comparison of Shariah Compliant Companies in Malaysia and Indonesia." International Journal of Business and Society 23, no. 3 (2022): 1443–1461. https://doi.org/10.33736/ijbs.5174.2022.

IFRS Foundation. "ISSB Issues Inaugural Global Sustainability Disclosure Standards." June 26, 2023. https://www.ifrs.org/news–and–events/news/2023/06/issb–issues–ifrs–s1–ifrs–s2/.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK–Nomor–21POJK042014–Penerapan–Pedoman–Tata–Kelola–Perusahaan–Terbuka.aspx.

OECD. G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023. Paris: OECD Publishing, 2023. https://doi.org/10.1787/ed750b30–en.

PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Annual Report 2023. Jakarta: PT Indofood Sukses Makmur Tbk, 2023. https://www.indofood.com/investor–relation/annual–report.

PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Annual Report 2024. Jakarta: PT Indofood Sukses Makmur Tbk, 2024. https://www.indofood.com/investor–relation/annual–report.

PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sustainability Report 2023. Jakarta: PT Indofood Sukses Makmur Tbk, 2023. https://www.indofood.com/sustainability/.

PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sustainability Report 2024. Jakarta: PT Indofood Sukses Makmur Tbk, 2024. https://www.indofood.com/sustainability/.

Tricker, Bob. Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2019.